



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1360>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 9-25

Research Article

Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an

Khoiriah

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : khoiriah144@gmail.com 



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 06, 2024
Accepted : April 01, 2024

Revised : March 17, 2024
Available online : June 10, 2024

How to Cite: Khoiriah (2024) "The Concept of Political Communication in the Al-Qur'an", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 9–25. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1360.

The Concept of Political Communication in the Al-Qur'an

Abstract. This research explores the concept of political communication in the Qur'an and its relevance to the modern context. Through an in-depth analysis of the verses of the Qur'an, the main principles of political communication are found, such as consultation (shura), honesty, justice, openness, and transparency. The principle of consultation emphasizes the importance of open consultation and exchange of views in decision-making, in line with the concept of participatory democracy. The principles of honesty and justice maintain integrity and public trust, while openness and transparency encourage participation and accountability in governance. Although facing challenges in the digital age, these principles remain relevant and can form the basis for effective, ethical political communication that contributes positively to the development of a harmonious and prosperous society.

Keywords: Political Communication, Qur'an, Consultation, Honesty, Justice.

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi konsep komunikasi politik dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan konteks modern. Melalui analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan prinsip-prinsip utama komunikasi politik, seperti musyawarah (shura), kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan transparansi. Prinsip musyawarah menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif. Prinsip kejujuran dan keadilan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, sedangkan keterbukaan dan transparansi mendorong partisipasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan di era digital, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi komunikasi politik yang efektif, etis, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Al-Qur'an, Musyawarah, Kejujuran, Keadilan.

PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan salah satu komponen vital dalam sistem demokrasi modern, di mana pertukaran informasi antara pemerintah, politisi, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam pembentukan opini publik dan pengambilan keputusan kebijakan (Nasution, L. K., 2020). Dalam era digital saat ini, dinamika komunikasi politik mengalami perubahan signifikan dengan kemunculan teknologi baru dan platform media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P., 2021). Hal ini memberikan tantangan dan peluang baru bagi aktor-aktor politik dalam mengelola pesan mereka dan mempengaruhi audiens (Hasfi, N., 2019).

Studi tentang komunikasi politik tidak hanya relevan untuk memahami mekanisme penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, tetapi juga penting untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dan pengaruh didistribusikan dalam Masyarakat (Indrawan, J., & Ilmar, A., Medium). Sebagai disiplin ilmu yang multidisipliner, komunikasi politik melibatkan berbagai pendekatan dari ilmu politik, komunikasi, sosiologi, dan psikologi untuk menganalisis interaksi antara aktor politik dan public (Alam, S., 2021).

Selain itu, pentingnya etika dalam komunikasi politik semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks meningkatnya prevalensi berita palsu dan misinformasi (Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A., 2021). Fenomena ini tidak hanya mengancam kualitas informasi yang diterima oleh publik, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (Rahmah, S., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi etis dari praktik komunikasi politik dan bagaimana etika dapat ditegakkan untuk memastikan komunikasi yang lebih bertanggung jawab dan transparan.

Dalam konteks komunikasi politik, salah satu prinsip utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah musyawarah atau shura. Prinsip ini menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat dalam proses pengambilan Keputusan (Hidayati, F. R., 2021). Dua ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Asy-Syura (42:38) dan Surah Ali Imran (3:159). Ayat-ayat ini menekankan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah dalam urusan mereka, baik yang bersifat sosial, politik, maupun pribadi. Musyawarah memungkinkan tercapainya

keputusan yang lebih bijaksana karena melibatkan berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat (Afriadi, A., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., Irwansyah, I., & Afriani, A. L., 2019). Dalam Surah Asy-Syura 42:38, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Ayat ini menekankan bahwa keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan kebijaksanaan kolektif dan keadilan, karena semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya. Musyawarah atau konsultasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam komunikasi politik yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog dan pertukaran pendapat yang terbuka dan inklusif. Dalam Surah Asy-Syura ayat 38, Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan urusan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil melalui musyawarah mencerminkan kebijaksanaan kolektif dan keadilan, karena melibatkan perspektif dan pengalaman yang beragam dari berbagai pihak yang berkepentingan (Riauan, M. A. I., 2020). Dalam konteks komunikasi politik, musyawarah memainkan peran yang sangat signifikan. Proses ini memfasilitasi partisipasi aktif dari setiap individu yang memiliki kepentingan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, dan kontribusi mereka dalam pengambilan Keputusan (Kasman, S., 2019). Musyawarah tidak hanya memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan lebih komprehensif dan inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak, musyawarah dapat mencegah dominasi pendapat dari satu kelompok tertentu dan memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan secara proporsional (Suryana, C., 2021).

Lebih lanjut, musyawarah berkontribusi dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P., 2021). Ketika individu atau kelompok terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mereka cenderung merasa lebih terikat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan tersebut (Fauzi, A. M., Novinayah, F. S., Darmawan, O. A., & Rivaldi, R., 2019). Hal ini dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan atau program yang dihasilkan melalui musyawarah, sehingga memfasilitasi implementasi yang lebih efektif (Nasution, A. R. H., 2022) Akan tetapi, perlu dipahami bahwa musyawarah bukanlah proses yang sederhana. Memfasilitasi musyawarah yang efektif membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, sikap terbuka, dan kesediaan untuk mendengarkan serta menghargai pendapat orang lain secara objektif. Dalam

konteks komunikasi politik, para pemimpin dan pembuat kebijakan harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi musyawarah, di mana setiap pihak merasa aman untuk menyampaikan pandangan mereka tanpa rasa takut atau intimidasi (Setiawan, W., & Muhid, A., 2021). Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Musyawarah juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam Surah Ali Imran 3:159, Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sikap lemah lembut dan inklusif dalam memimpin, serta menunjukkan bahwa musyawarah dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat. Dalam praktik komunikasi politik, musyawarah dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme seperti forum diskusi publik, dewan konsultatif, dan proses legislatif yang transparan. Dengan menerapkan prinsip ini, para pemimpin dan pembuat kebijakan tidak hanya akan mampu membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi di mata masyarakat. Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa kekuatan sebuah keputusan terletak pada partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya adil tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain Surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT memberikan petunjuk yang berharga terkait implementasi musyawarah dalam komunikasi politik. Ayat ini secara khusus ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun memiliki relevansi yang kuat bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan di semua zaman. Allah SWT memerintahkan untuk berlaku lemah lembut dan menghindari sikap keras atau berhati kasar, karena hal tersebut dapat menyebabkan orang-orang menjauh. Sebaliknya, sikap lemah lembut dan inklusif dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara anggota masyarakat.

Pada ayat ini, Allah SWT juga memerintahkan untuk bermusyawarah dengan orang-orang dalam segala urusan penting. Ini menunjukkan bahwa musyawarah merupakan prinsip yang fundamental dalam pengambilan keputusan, terutama dalam konteks komunikasi politik. Melalui musyawarah, setiap individu atau kelompok yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan

pandangan dan aspirasinya, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

Dalam praktik komunikasi politik, musyawarah dapat diimplementasikan melalui berbagai mekanisme, seperti forum diskusi publik, dewan konsultatif, dan proses legislatif yang transparan (Hidayat, R., & Suwanto, S., 2020). Para pemimpin dan pembuat kebijakan harus terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Proses musyawarah yang inklusif dan partisipatif tidak hanya akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi di mata Masyarakat (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P., 2021).

Prinsip musyawarah dalam komunikasi politik mengajarkan bahwa kekuatan sebuah keputusan terletak pada partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan, hasil yang dicapai tidak hanya akan menjadi lebih adil, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini membantu mencegah konflik dan resistensi yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Pada akhirnya, penerapan musyawarah dalam komunikasi politik sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dapat berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, stabil, dan sejahtera (Suryana, C., 2021).

Meskipun prinsip musyawarah dalam komunikasi politik telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun masih terdapat penelitian yang diperlukan dalam hal penerapan praktis prinsip ini dalam konteks modern. Era digital saat ini menghadirkan tantangan baru dalam komunikasi politik, dengan kemunculan teknologi baru dan platform media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip musyawarah dapat diimplementasikan secara efektif dalam lingkungan komunikasi politik yang semakin dinamis dan terfragmentasi ini. Urgensi dari aspek penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip musyawarah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks komunikasi politik modern (Syabana, M. S. A., & Suyono, S., 2023).

Selain itu, terdapat penelitian yang perlu dilakukan dalam hal studi komparatif antara prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an dengan teori-teori komunikasi politik modern. Teori-teori seperti agenda setting, framing, dan spiral keheningan telah dikembangkan oleh para ahli di bidang komunikasi politik. Namun, belum banyak penelitian yang mengeksplorasi keselarasan dan perbedaan antara prinsip musyawarah dengan teori-teori tersebut. Penelitian yang mengisi aspek ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang komunikasi politik yang efektif dan beretika, serta bagaimana prinsip-prinsip agama dapat diintegrasikan dengan teori-teori modern (Hasfi, N., 2019).

Aspek penelitian lain yang perlu dieksplorasi adalah peran musyawarah dalam menciptakan perdamaian dan resolusi konflik dalam konteks komunikasi politik. Al-Qur'an menekankan pentingnya perdamaian dan menghindari perpecahan, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana prinsip musyawarah dapat berkontribusi dalam mengatasi konflik dan membangun dialog

yang konstruktif (Mustapa, 2020). Urgensi dari aspek penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan strategi komunikasi politik yang efektif dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan rekonsiliasi berdasarkan prinsip-prinsip agama (Hidayati, F. R., 2021).

Terdapat penelitian yang diperlukan terkait dengan dampak komunikasi politik yang baik terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat, namun belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana komunikasi politik yang sesuai dengan prinsip musyawarah dapat mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang berkelanjutan (Sujoko, A. , 2019). Mengisi aspek penelitian ini memiliki urgensi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara komunikasi politik yang baik dengan pembangunan masyarakat yang sejahtera dan Makmur (Al Mujib, I. H., 2020).

Dengan mengeksplorasi aspek-aspek penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan prinsip musyawarah dalam komunikasi politik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, serta solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan komunikasi politik di era modern. Untuk mengeksplorasi aspek-aspek penelitian terkait konsep musyawarah dalam komunikasi politik menurut Al-Qur'an, pendekatan penelitian kualitatif dapat digunakan. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian dapat menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi penerapan prinsip musyawarah dalam komunikasi politik di lingkungan tertentu, seperti lembaga pemerintahan, partai politik, atau organisasi masyarakat sipil (Sari, 2022).

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan meliputi wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, politisi, aktivis, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang perspektif, pengalaman, dan praktik musyawarah dalam komunikasi politik yang dilakukan. Selain itu, observasi partisipatif juga dapat dilakukan untuk mengamati secara langsung proses musyawarah dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. , 2019).

Analisis data kualitatif, seperti analisis tematik atau analisis wacana kritis, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data yang dikumpulkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip musyawarah diterapkan dalam praktik komunikasi politik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada (Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N., 2023). Selain itu, analisis komparatif juga dapat dilakukan untuk membandingkan praktik musyawarah dengan teori-teori komunikasi politik modern, serta mengeksplorasi keselarasan dan perbedaan di antara keduanya.

Untuk memahami dampak komunikasi politik yang baik terhadap pembangunan masyarakat dan negara, penelitian dapat menggunakan metode studi kasus longitudinal atau penelitian tindakan partisipatif. Dengan melibatkan

masyarakat secara langsung dalam proses penelitian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis dampak jangka panjang dari penerapan prinsip musyawarah dalam komunikasi politik terhadap pembangunan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Dengan mengombinasikan berbagai metode penelitian kualitatif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik tentang penerapan konsep musyawarah dalam komunikasi politik menurut Al-Qur'an, serta implikasinya bagi pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Musyawarah (Shura)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip utama komunikasi politik dalam al-qur'an adalah musyawarah atau shura. prinsip ini ditemukan dalam beberapa ayat, seperti surah asy-syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Surah Asy-Syura ayat 38 menyajikan prinsip musyawarah atau shura sebagai landasan utama dalam komunikasi politik dan pengambilan keputusan. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mematuhi perintah Allah, salah satu ciri utama mereka adalah bahwa urusan mereka diputuskan melalui musyawarah atau konsultasi di antara mereka sendiri. Prinsip ini mencerminkan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai pendapat serta aspirasi setiap individu atau kelompok yang berkepentingan. Dalam konteks komunikasi politik, musyawarah menjadi prinsip yang sangat relevan dan penting untuk diimplementasikan. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, pendapat, dan sudut pandang yang beragam dari berbagai pihak, seperti pemerintah, politisi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara.

Melalui musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebijaksanaan kolektif dan mencapai keadilan bagi semua pihak. Implementasi prinsip musyawarah dalam komunikasi politik dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti forum diskusi publik, dewan konsultatif, dan proses legislatif yang transparan. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan terjadinya dialog yang terbuka, inklusif, dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan. Dengan mengadopsi pendekatan musyawarah, para pembuat kebijakan dapat memperoleh masukan yang lebih kaya dan beragam, serta membangun dukungan dan legitimasi dari masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Namun, penerapan prinsip musyawarah dalam komunikasi politik juga menghadapi tantangan dan kendala

tertentu. Salah satunya adalah risiko dominasi oleh kelompok atau individu yang memiliki kekuatan atau pengaruh lebih besar, sehingga dapat menghambat partisipasi yang setara dari semua pihak. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses musyawarah juga dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil atau kurang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk memastikan bahwa prinsip musyawarah diimplementasikan dengan cara yang benar-benar inklusif, terbuka, dan adil. Selanjutnya Surah Ali Imran ayat 159 memberikan landasan yang kuat untuk prinsip musyawarah dalam Islam, yang relevan dalam berbagai konteks, termasuk pribadi, sosial, dan politik. Ayat tersebut berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: "Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal."

Ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam penyelesaian urusan, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun politik. Dalam konteks pribadi, musyawarah dapat digunakan sebagai metode untuk mencapai kesepakatan dalam masalah keluarga atau keputusan penting lainnya. Ayat ini mengajarkan bahwa pemimpin keluarga, seperti halnya pemimpin dalam konteks yang lebih luas, harus mengedepankan sikap lemah lembut dan inklusif, sehingga setiap anggota merasa didengarkan dan dihargai.

Dalam konteks sosial, musyawarah dapat menjadi alat yang efektif untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan kerjasama. Sikap lemah lembut yang dianjurkan dalam ayat ini menunjukkan pentingnya empati dan pengertian dalam berinteraksi dengan orang lain. Proses musyawarah memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pandangan mereka, yang dapat mengarah pada solusi yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Hal ini penting dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari perpecahan di dalam masyarakat. Dalam konteks politik, prinsip musyawarah sangat relevan untuk sistem pemerintahan yang demokratis. Ayat ini menekankan pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik, di mana pemimpin harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat dari berbagai kelompok masyarakat. Musyawarah dalam politik dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti forum publik, dewan konsultatif, dan proses legislatif yang transparan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta memperkuat legitimasi pemerintahan.

Ayat ini juga menekankan pentingnya tawakkal atau berserah diri kepada Allah setelah keputusan diambil. Ini menunjukkan bahwa setelah melalui proses musyawarah yang komprehensif dan inklusif, para pemimpin dan pembuat kebijakan harus memiliki keyakinan dan ketenangan dalam melaksanakan keputusan tersebut, seraya memohon bimbingan dan keberkahan dari Allah. Secara keseluruhan, analisis Surah Ali Imran ayat 159 menggarisbawahi bahwa musyawarah bukan hanya sebuah prosedur teknis, tetapi juga nilai moral yang penting dalam Islam. Prinsip ini mendukung terciptanya keputusan yang lebih bijaksana, adil, dan inklusif dalam berbagai konteks kehidupan. Penerapan musyawarah dapat memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan memperkuat tata kelola yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Musyawarah, sebagai proses konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan inklusif, memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kebijaksanaan kolektif dan keadilan. Surah Ali Imran ayat 159 menegaskan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan sikap lemah lembut dan inklusif. Proses ini bukan hanya tentang mendengarkan pendapat, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Dalam konteks komunikasi politik, ini berarti bahwa pemimpin harus mengutamakan empati dan kesabaran dalam mendengarkan aspirasi dan pandangan masyarakat. Sikap inklusif ini mendorong partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana dan dapat diterima oleh banyak pihak.

Surah Asy-Syura ayat 38 menyoroti bahwa musyawarah adalah bagian integral dari kehidupan umat Islam yang taat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mencerminkan komitmen kolektif untuk mencari solusi terbaik yang mencakup keadilan dan kebijaksanaan bersama. Dalam praktik komunikasi politik, ini diterjemahkan sebagai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses legislasi dan kebijakan publik. Dengan melibatkan suara-suara yang beragam, keputusan yang diambil lebih representatif dan mencerminkan kepentingan seluruh komunitas.

Musyawarah sebagai proses konsultasi dan pertukaran pendapat yang inklusif memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks komunikasi politik dan tata kelola. *Pertama*, musyawarah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan yang diambil lebih mudah dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada konsensus dan persetujuan bersama. *Kedua*, musyawarah memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Keputusan yang dihasilkan dari proses yang inklusif dan partisipatif lebih cenderung diterima dan didukung oleh masyarakat, karena mereka merasa memiliki andil dalam proses tersebut. *Ketiga*, musyawarah juga memainkan peran penting dalam memperkuat kohesi sosial dan solidaritas. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan berbagai pihak, musyawarah membantu mengatasi perbedaan dan konflik, serta mendorong kerjasama dan pemahaman yang lebih baik

di antara anggota masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial, serta menghindari polarisasi yang dapat mengancam integritas komunitas.

Kesimpulannya, prinsip musyawarah yang diuraikan dalam Surah Ali Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38 menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif dan adil memerlukan proses konsultasi yang inklusif. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, musyawarah memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara prosedural tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan kolektif. Prinsip ini sangat relevan dalam membangun tata kelola yang baik dan mendukung demokrasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kejujuran dan Keadilan

Selain prinsip musyawarah, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik. Penelitian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Maidah 5:8 dan Surah An-Nisa 4:135 mengungkapkan bahwa umat Muslim diperintahkan untuk berlaku adil dan jujur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam komunikasi politik. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks komunikasi politik modern, di mana integritas dan kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan proses politik sangat penting. Surah Al-Maidah 5:8 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu berpegang pada keadilan, bahkan terhadap orang-orang yang mungkin mereka tidak sukai. Ayat ini mengingatkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai utama dalam Islam dan harus ditegakkan tanpa memandang perbedaan pribadi atau kelompok. Dalam komunikasi politik, prinsip ini berarti bahwa politisi dan pemimpin harus berusaha untuk bersikap adil dalam setiap tindakan dan keputusan mereka, termasuk dalam penyampaian informasi dan kebijakan kepada publik. Keadilan dalam komunikasi politik membantu mencegah diskriminasi dan bias, serta memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Surah An-Nisa 4:135 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan, bahkan jika hal itu berlawanan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Ayat ini mengingatkan bahwa seorang Muslim harus selalu bersikap jujur dan adil, meskipun hal itu mungkin sulit atau merugikan diri sendiri. Dalam konteks komunikasi politik, kejujuran ini sangat penting karena politisi dan pemimpin sering kali dihadapkan pada godaan untuk memanipulasi informasi demi keuntungan politik. Kejujuran dalam komunikasi politik berarti menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada publik, menghindari manipulasi dan misinformasi, serta transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik juga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik. Ketika pemimpin dan politisi dikenal karena integritas dan keadilan mereka, masyarakat cenderung lebih percaya dan mendukung kebijakan yang mereka buat. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang positif antara pemerintah dan warga negara, yang pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas dan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik juga berkontribusi pada pembentukan opini publik yang lebih sehat dan konstruktif. Dengan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan adil, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik. Hal ini juga membantu mengurangi polarisasi dan konflik di dalam masyarakat, karena semua pihak merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil dan informasi yang mereka terima dapat dipercaya.

Dalam kesimpulannya, analisis terhadap prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah 5:8 dan Surah An-Nisa 4:135, menunjukkan bahwa nilai-nilai ini sangat relevan dalam komunikasi politik. Penerapan prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya memastikan bahwa keputusan dan informasi yang disampaikan kepada publik adalah benar dan adil, tetapi juga membantu membangun kepercayaan dan legitimasi yang diperlukan untuk pemerintahan yang efektif dan stabil. Dengan demikian, kejujuran dan keadilan harus

menjadi landasan dalam setiap aspek komunikasi politik, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Keterbukaan dan Transparansi.

Penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menganjurkan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik. Ayat seperti Al-Baqarah 2:188 menekankan pentingnya keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Analisis mendalam terhadap ayat ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan dalam konteks komunikasi politik modern.

Surah Al-Baqarah ayat 188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keuangan dan komunikasi politik. Larangan terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau membawa perkara yang tidak benar kepada pemerintah menggarisbawahi prinsip-prinsip integritas dan transparansi. Dalam konteks komunikasi politik, ayat ini memberikan pengingat bahwa pemimpin dan elit politik harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka sampaikan kepada publik, serta tidak boleh memanipulasi kebenaran demi keuntungan pribadi atau politik.

Penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik memiliki implikasi yang signifikan dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik. Selain itu, transparansi juga membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, karena tindakan-tindakan tersebut lebih mudah terungkap dalam lingkungan yang terbuka dan terbuka.

Dalam konteks demokrasi, keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik juga merupakan syarat mutlak untuk mendukung partisipasi politik yang lebih luas dan responsif. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi publik, mereka dapat terlibat lebih aktif dalam proses pembuatan keputusan dan memberikan umpan balik yang lebih berarti kepada pemimpin dan pembuat kebijakan. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintah, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kesimpulannya, ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah 2:188 memberikan landasan yang kuat untuk mendorong keterbukaan dan transparansi dalam

komunikasi politik. Prinsip-prinsip ini tidak hanya penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi pemerintah, tetapi juga dalam memperkuat partisipasi politik dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemimpin dan elit politik harus memperhatikan dan menginternalisasi nilai-nilai keterbukaan dan transparansi ini dalam setiap aspek komunikasi politik mereka, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan responsif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip komunikasi politik yang komprehensif dan relevan dengan konteks modern. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah musyawarah atau shura, yang menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan inklusif dalam pengambilan keputusan. Konsep ini tidak hanya merupakan pandangan Islam klasik, tetapi juga sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif dan deliberatif yang dianut oleh banyak negara modern. Dalam prakteknya, prinsip musyawarah mempromosikan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang berkepentingan, memastikan bahwa suara semua elemen masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip ini membentuk dasar bagi tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.

Prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an juga menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan yang disepakati bersama melalui dialog dan konsensus. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil keputusan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan berkeadilan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dalam masyarakat. Dalam konteks kontemporer, prinsip musyawarah Al-Qur'an juga memiliki implikasi penting untuk pembangunan demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, prinsip ini memperkuat dasar demokratis yang melampaui sekadar pemilihan umum dan mencakup pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif. Dengan demikian, prinsip musyawarah dapat menjadi panduan bagi negara-negara modern dalam mengembangkan institusi dan praktik demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan. Prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman dan praktik komunikasi politik dalam konteks kontemporer. Prinsip ini tidak hanya menegaskan pentingnya dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi partisipatif dan inklusif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktek komunikasi politik, negara-negara modern dapat memperkuat legitimasi, responsivitas, dan kohesi sosial dalam sistem politik mereka.

Selain prinsip musyawarah, prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks modern. Kejujuran dan keadilan merupakan fondasi yang tak tergantikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi politik. Al-Qur'an menegaskan bahwa kejujuran dalam komunikasi politik adalah kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini tidak hanya memastikan integritas dalam

penyampaian informasi, tetapi juga memperkuat kredibilitas pemimpin dan pemerintah di mata publik.

Dalam era pasca-kebenaran dan meningkatnya misinformasi di media sosial, prinsip kejujuran dan keadilan menjadi semakin relevan untuk menjaga integritas dan kredibilitas komunikasi politik. Penyebaran informasi palsu atau fitnah dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta mengganggu stabilitas politik dan sosial. Oleh karena itu, kejujuran dalam komunikasi politik menjadi landasan yang tidak dapat ditawar-tawar untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan pemahaman yang akurat tentang isu-isu politik.

Prinsip keadilan dalam komunikasi politik juga berperan penting dalam menjamin hak-hak semua pihak dan mencegah diskriminasi atau penindasan dalam penyampaian informasi. Dengan memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan tanpa pandang bulu, prinsip ini membantu memperkuat inklusivitas dalam proses politik dan meningkatkan representasi kepentingan yang beragam dalam pengambilan keputusan.

Melalui prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik, Al-Qur'an menawarkan panduan yang kokoh bagi pembangunan sistem politik yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era di mana informasi dapat dengan mudah tersebar dengan cepat dan luas, mematuhi prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas komunikasi politik, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, menjadi kunci bagi terwujudnya sistem politik yang inklusif, adil, dan berdaya.

Keterbukaan dan transparansi juga merupakan prinsip penting dalam komunikasi politik menurut Al-Qur'an. Prinsip ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Al-Qur'an menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan bahwa informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Dalam konteks modern, keterbukaan dan transparansi menjadi semakin penting untuk memerangi korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat terhadap informasi publik, pemerintah dapat meningkatkan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik juga membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses kepada publik, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil, karena didasarkan pada masukan dan umpan balik yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan.

Adanya prinsip keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, memiliki implikasi yang sangat penting dalam pembangunan sistem politik yang adil, transparan, dan berakuntabilitas. Dalam era di mana kepercayaan publik semakin penting dan korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan pembangunan negara, mematuhi prinsip-prinsip ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan keberlangsungan pemerintahan yang baik. Namun, penerapan prinsip-prinsip komunikasi politik dalam al-qur'an juga menghadapi tantangan dalam konteks modern. Era digital dan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara signifikan, dengan penyebaran informasi yang lebih cepat dan terfragmentasi. Hal ini menuntut strategi dan pendekatan komunikasi yang lebih adaptif dan inovatif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam al-qur'an.

Selain itu, penelitian juga mengungkapkan tantangan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi musyawarah yang sebenarnya, seperti kurangnya kesediaan untuk mendengarkan pendapat yang berbeda dan dominasi kelompok tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang konsep komunikasi politik dalam al-qur'an dan relevansinya dengan konteks modern. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan transparansi dapat menjadi landasan bagi komunikasi politik yang efektif, etis, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip komunikasi politik yang komprehensif dan relevan dengan konteks modern. Prinsip-prinsip seperti musyawarah (shura), kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan transparansi memberikan fondasi yang kokoh bagi praktik komunikasi politik yang efektif dan bertanggung jawab. Prinsip musyawarah menegaskan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat terbuka dalam pengambilan keputusan, sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif dan deliberatif. Sementara itu, prinsip kejujuran dan keadilan menjadi pijakan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyebaran informasi palsu atau fitnah, terutama di era pasca-kebenaran dan meningkatnya misinformasi di media sosial. Keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap pemerintah, serta memerangi korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya di era digital dengan penyebaran informasi yang cepat dan terfragmentasi, prinsip-prinsip komunikasi politik dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi praktik komunikasi yang efektif, etis, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

REFRENSI

- Afriadi, A., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., Irwansyah, I., & Afriani, A. L. (2019). Komunikasi Politik “Rasa” Ala Jokowi Dalam Merespon Politik Sentimen. *Wacana*, 18(2), 142-153.
- Al Mujib, I. H. (2020). Perspektif Islam Dalam Komunikasi Politik Kyai (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur). *Jurnal Nomosleca*, 6(1).
- Alam, S. (2021). Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik. *Avant Garde*, 9(1), 67.
- Fauzi, A. M., Novinayah, F. S., Darmawan, O. A., & Rivaldi, R. (2019). Kontroversi Sosial Caleg Perempuan Pks (Komunikasi Politik, Dogma Agama & Afirmasi). *Mediakom*, 3(1), 40-52.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Tahta Media.
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik Di Era Digital. *Politika*, 10(1).
- Hidayat, R., & Suwanto, S. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad Saw Periode Madinah Dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 124-141.
- Hidayati, F. R. (2021). Komunikasi Politik Dan Branding Pemimpin Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(2), 145-161.
- Indra, D., Wahid, U., & Magister, P. (2021). Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik Anies Baswedan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 228-239.
- Indrawan, J., & Ilmar, A. (Medium). Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik. 2020, 8(1), 1-17.
- Kasman, S. (2019). Komunikasi Politik Nabi Muhammad Saw Terhadap Perjanjian Hudaibiyah (Analisis Surat Perjanjian Hudaibiyah Dalam Perspektif Jurnalistik). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 20(1), 1-20.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp).
- Mustapa, H. & (2020). Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(1), 133-172.
- Nasution, A. R. H. (2022). Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan Cory Sriwaty Sebayang-Theopilus Ginting Pada Pilkada Karo Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [Jimsipol]*, 2(2).
- Nasution, L. K. (2020). Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an. *Hikmah*, 14(1), 151-164.
- Rahmah, S. (2021). Personal Branding Ganjar Pranowo Untuk Membangun Komunikasi Politik Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 94-101.
- Riauan, M. A. I. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru Di Riau Pos. *Ettisal*, 5(1).
- Sari, I. N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press.

- Setiawan, W., & Muhid, A. . (2021). Pengaruh Media Terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Literatur Review. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(1), 73-85.
- Sujoko, A. . (2019). Komunikasi Politik Gerakan# 2019gantipresiden. . *Jurnal Komunikasi Islam*, 9(1), 36-57.
- Suryana, C. . (2021). Politik Sebagai Dakwah: Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (Pks). *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1).
- Syabana, M. S. A., & Suyono, S. . (2023). Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu 2024 (Studi Kasus Pada Tokoh Pemuka Pendapat Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember). *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 1(1), 9-9.
- Triwicaksono, Y. D. B. B., & Nugroho, A. (2021). Strategi Komunikasi Politik Pemenangan Kepala Daerah. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 5(1), 133-145.